

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Arfida (2013), permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah (yang dilihat dari persepektif seorang majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan (dalam hal ini dapat dikatakan dibeli). Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan (Arfida, 2013):

1. Tingkat upah

Makin tinggi tingkat upah, makin sedikit tenaga kerja yang diminta. Begitu pula sebaliknya.

2. Teknologi

Kemampuan menghasilkan tergantung teknologi yang dipakai. Makin efektif teknologi, makin besar artinya bagi tenaga kerja dalam mengaktualisasi keterampilan dan kemampuannya.

3. Produktivitas

Produktivitas tergantung modal yang dipakai. Keleluasaan modal akan menaikkan produktivitas kerja.

4. Kualitas tenaga kerja

Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang merupakan indeks kualitas tenaga kerja mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Begitu pula keadaan gizi mereka.

5. Fasilitas modal

Dalam realisasinya, produk dihasilkan atas sumbangan modal dan tenaga kerja yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan peranan input yang lain dapat merupakan faktor penentu lain.

Menurut Sumarsono (2003), permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil.

1. Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

2. Perubahan permintaan pasar

Permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

3. Harga barang modal turun

Apabila harga modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil produksi bertambah besar. Disamping itu permintaan akan tenaga kerja dapat bertambah besar karena peningkatan kegiatan perusahaan.

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi Neo Klasik, dimana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahawa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar (*price taker*). Dalam hal ini memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur beberapa jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada: (1) tambahan hasil marjinal, yaitu tambahan hasil (output) yang diperoleh dengan penambahan seorang pekerja atau istilah lainnya disebut *Marginal Physical Product* dari tenaga kerja (MPPL), (2) penerimaan marjinal, yaitu jumlah uang yang kan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut atau istilah lainnya disebut *Marginal Revenue* (MR). Penerimaan marjinal disini merupakan besarnya tambahan hasil marjinal dikalikan dengan harga per unit, sehingga $MR = P \cdot MPPL$, dan (3) biaya marjinal, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan mempekerjakan tambahan seseorang pekerja, dengan kata lain upah karyawan tersebut. Apabila tambahan penerimaan marjinal lebih besar dari biaya marjinal, maka mempekerjakan orang tersebut akan menambah keuntungan pemeberi kerja, sehingga ia akan terus menambah jumlah pekerja selama MR lebih besar dari tingkat upah (Bellante and Jackson, 1990).

Value Marginal Physical Product of Labor atau VMPPL adalah nilai pertambahan hasil marjinal dari tenaga kerja. P adalah a harga jual barang per unit, D_L adalah permintaan tenaga kerja, W adalah tingkat upah, dan L adalah jumlah tenaga kerja. Peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap barang yang dikonsumsi. Semakin tinggi permintan masyarakat akan barang tertentu, maka jumlah tenaga kerja yang diminta suatu lapangan usaha akan semakin meningkat dengan asumsi tingkat upah tetap.

Peningkatan jumlah tenaga kerja dalam suatu lapangan usaha tidak dilakukan untuk jangka pendek, walupun permintaan masyarakat terhadap peroduk yang dihasilkan tinggi. Dalam jangka pendek, pengusaha lebih mengoptimalkan jumlah tenaga kerja yang ada dengan penambahan jam kerja atau penggunaan mekanisasi, sedangkan dalam jangka panjang kenaikan jumlah permintaan masyarakat akan direspon dengan menambah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Hal ini berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru.

Marginal Revenue Product atau MRP dari suatu input variabel adalah penerimaan tambahan yang diperoleh suatu perusahaan dengan mempekerjakan unit input tambahan, *ceteris paribus*. Jika tenaga kerja adalah faktor variabel, misalnya merekrut unit tambahan akan menghasilkan output tambahan (produk marginal dari tenaga kerja). Penjualan output tambahan itu akan menghasilkan penerimaan. Produk penerimaan marginal adalah penerimaan yang diproduksi oleh unit marginal tenaga kerja. Dalam perusahaan bersaing, produk penerimaan marginal adalah nilai produk marginal suatu faktor (Case and Fair, 2007).

Dengan menggunakan tenaga kerja sebagai faktor variabel, kita bisa menyatakan dalil ini dengan lebih formal dengan mengatakan jika MPL adalah produk tenaga kerja marginal dan PX adalah harga output, maka produk penerimaan marginal dari tenaga kerja adalah $MPPL = MPL \times PX$ (Case and Fair, 2007).

Menurut Simanjuntak (2005), dasar yang digunakan pengusaha untuk menambah atau mengurangi jumlah karyawan adalah: pertama-tama sang pengusaha perlu memikirkan tambahan hasil (output) yang diperoleh pengusaha sehubungan dengan penambahan seorang karyawan. Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil marjinal atau *marginal physical product* dari karyawan, atau disingkat MPPL. Kedua, pengusaha menghitung jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan

hasil marginal tersebut. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marginal atau *marginal revenue*, yaitu nilai MR tadi. Jadi, *marginal revenue* sama dengan nilai dari MPPL, yaitu besarnya MPPL dikalikan dengan harganya per unit (P). Jadi:

$$MR = VMPPL = MPPL \times P$$

Dimana:

MR : *Marginal revenue* (penerimaan marginal)

VMPPL : *Value marginal physical product of labor* (nilai pertambahan hasil marginal dari karyawan)

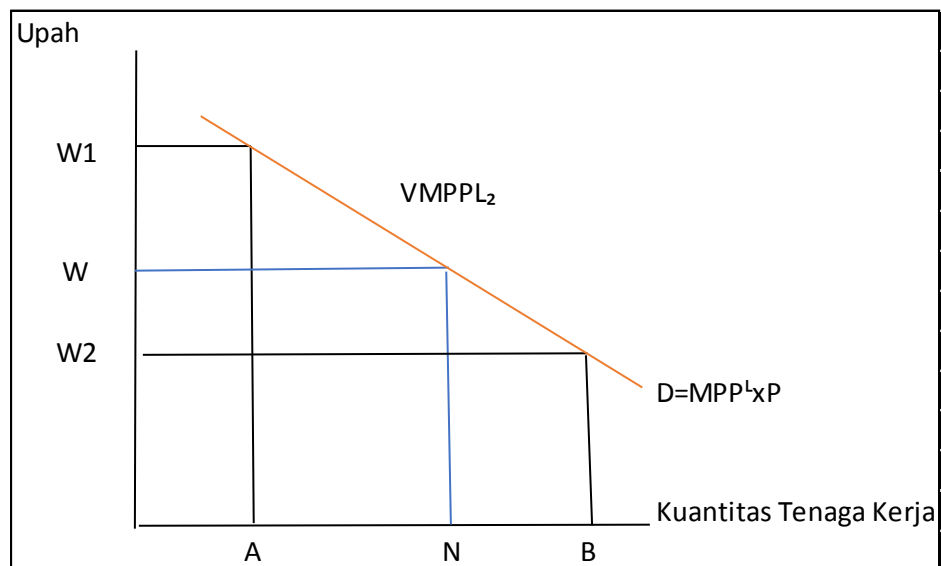
MPPL : *Marginal physical product of labor*

P : Harga jual barang yang diproduksi per unit.

Akhirnya pengusaha membandingkan MR tersebut dengan biaya mempekerjakan tambahan seorang tadi. Jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha sehubungan dengan mempekerjakan tambahan seorang karyawan adalah upahnya sendiri (W) dan dinamakan biaya marjinal atau *marginal cost* (MC). Bila tambahan penerimaan marjinal (MR) lebih besar dari biaya mempekerjakan orang yang menghasilkannya (W), maka mempekerjakan tambahan orang tersebut akan menambah keuntungan pengusaha. Dengan kata lain dalam rangka menambah keuntungan, pengusaha akan terus menambah jumlah karyawan selama MR lebih besar dari W (Simanjuntak, 2005).

Misalnya tenaga kerja terus bertambah sedangkan alat-alat dan faktor produksi lain jumlahnya tetap. Maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marginal menjadi lebih kecil pula. Dengan kata lain, semakin bertambah karyawan yang dipekerjakan, semakin kecil MPPL-nya dan nilai MPPL itu sendiri.

Ini yang dinamakan hukum diminishing returns dan dilukiskan dengan garis DD dalam gambar 2.1.



Sumber: Simanjuntak, 2005

Gambar 2.1 Fungsi Permintaan Terhadap Tenaga Kerja

Garis DD melukiskan besarnya nilai hasil marginal karyawan (*value marginal physical product of labor* atau VMPPL) untuk setiap tingkat penempatan. Bila misalnya jumlah karyawan yang dipekerjakan sebanyak $OA = 100$ Orang, maka nilai hasil kerja orang yang ke-100 dinamakan VMPPL nya dan besarnya sama dengan $MPPL \times P = W1$. Nilai ini lebih besar dari tinggkat upah yang sedang berlaku (W). Oleh sebab itu laba pengusaha akan bertambah dengan menambah tenaga kerja baru. Pengusaha dapat terus menambah laba perusahaan dengan mempekerjakan tenaga kerja hingga ON . Di titik N pengusaha mencapai laba maksimum dan nilai $MPPL \times P$ sama dengan upah yang dibayarkan pada karyawan. Dengan kata lain pengusaha mencapai laba maksimum bila $MPPL \times P = W$. Penambahan tenaga kerja yang lebih besar dari pada ON , misalnya OB akan mengurangi keuntungan pengusaha. Pengusaha membayar upah pada tingkat yang berlaku (W), padahal hasil nilai marginal yang diperoleh sebesar $W2$ yang lebih kecil dari pada W . Jadi pengusaha cenderung untuk menghindari jumlah karyawan yang lebih besar dari pada ON . Penambahan karyawan yang lebih besar dari ON dapat dilaksanakan hanya bila pengusaha yang bersangkutan dapat

membayar upah dibawah W atau pengusaha dapat menaikkan harga jual barang (Simanjuntak, 2005).

Aspek lain yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari hubungan tingkat upah, MPPL, harga barang dan jumlah karyawan yang dapat dipekerjakan adalah bahwa sebagai reaksi terhadap peningkatan upah (Simanjuntak, 2005):

1. Pengusaha menuntut peningkatan produktivitas kerja karyawannya sedemikian rupa hingga penambahan produksi yang dihasilkan karyawan senilai dengan penambahan upah yang diterimanya atau bila ini tidak dapat terlaksana,
2. Pengusaha terpaksa menaikkan harga jual barang,
3. Pengusaha mengurangi jumlah karyawan yang berkerja, atau
4. Pengusaha melakukan kombinasi dari dua diantara ke tiga alternatif diatas atau kombinasi dari ketiganya.

Permintaan tenaga kerja dapat dibedakan menjadi permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek dan permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Perbedaan antara permintaan jangka pendek dan jangka panjang adalah: (1) Penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerjayang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan tidak sanggup mengadakan perubahan terhadap inputnya yang lain, dan (2) Penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan itu sanggup mengadakan perubahan terhadap inputnya yang lain (Arfida, 2003).

2.1.2 Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja

Elastisitas permintaan tenaga kerja adalah suatu ukuran yang mengukur persentase perubahan permintaan tenaga kerja yang disebabkan adanya perubahan satu persen tingkat upah, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$e = \frac{\% \Delta N}{\% \Delta W} = \frac{\Delta N / N}{\Delta W / W} = \frac{\Delta N}{\Delta W} \times \frac{W}{N}$$

Dimana:

e = elastisitas permintaan tenaga kerja

N = jumlah tenaga kerja awal

W = tingkat upah yang sedang berlaku

ΔN = perubahan tingkat upah

Dengan melihat hubungan antara tingkat upah dengan permintaan tenaga kerja, dimana jika tingkat upah naik maka permintaan tenaga kerja menurun (hubungan negatif), maka nilai elastisitas permintaan tenaga kerja juga negatif.

Besar kecilnya elastisitas tenaga kerja ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

1. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lain, misalnya mesin.
2. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan.
3. Proposal biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi.
4. Elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya
5. Periode analisis

2.1.3 Teori Ketenagakerjaan

Terdapat beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan menurut Santoso (2012), yaitu:

- 1) Tenaga kerja (*Manpower*)

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

2) Angkatan Kerja (*Labor Force*)

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu produksi barang dan jasa. Atau dapat pula dikatakan bahawa angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia antara 15-64 tahun yang sedang berkerja maupun tidak berkerja. Penduduk usia kerja di luar orang yang bekerja dan tidak berkerja disebut dengan bukan angkatan kerja seperti halnya anak yang masih bersekolah dan ibu rumah tangga.

3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participation Rate*)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah situasi yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. Dengan kata lain TPAK menunjukan sampai seberapa persen penduduk angkatan kerja yang berkerja pada suatu negara.

Secara kualitas penawaran tenaga keraja dipengaruhi oleh kualitas *human capital* tenaga kerja. Artinya, kualitas tenaga kerja yang ditawarkan dipengaruhi oleh kualitas *human capitalnya*. Dan kualitas *human capital* ditentukan oleh tingkat pendidika, keterampilan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Tingkat persentase dari TPAK dapat didapatkan dengan rumus berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan kerja}}{\text{Tenaga kerja}} \times 100\%$$

4) Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*)

Tingkat penganguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Atau pengangguran adalah jumlah akumulasi oarang yang tidak berkerja pada

suatu titik waktu tertentu. Sementara itu, tingkat pengangguran adalah rasio antara jumlah orang yang tidak berkerja dibagi dengan angkatan kerja.

$$P = \frac{\text{Jumlah Orang yang Mencari Pekerjaan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} = 100\%$$

5) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang (a) tidak berkerja atau mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau (b) sedang mempersiapkan suatu usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan (b) mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

6) Setengah Pengangguran

Setengah pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang berkerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

2.1.4 Konsep Industri Pariwisata

2.1.4.1 Definisi Pariwisata

Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subyek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dan obyek wisata yang merupakan tujuan wisatawan.

Ber macam-macam pendapat para ahli mengenai pariwisata, diantaranya : Pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti, (1991:103). Pariwisata berasal dari dua kata yaitu pari dan wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar, atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "*reavel*" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata "Pariwisata" dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ketempat lain yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*Tour*".

Menurut A.J. Burkart dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal diempat-tempat tujuan.

Menurut James J Spillane (1982:20) pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan kenikmatan mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, dan memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas dan berziarah.

Sedangkan berdasarkan UU No.9 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha, daya tarik, dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Definisi pariwisata memang tidak pernah persis diantara para ahli. Pada dasarnya pariwisata merupakan perjalanan dengan tujuan untuk menghibur yang dilakukan diluar kegiatan sehari-hari yang dilakukan guna untuk memberikan keuntungan yang bersifat permanen atau sementara. Tetapi dilihat dari segi konteks pariwisata mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Terdapat dua lokasi yang saling terkait yaitu daerah asal dan juga daerah tujuan (destinasi).
2. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki objek dan juga daya tarik wisata.
3. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki sarana dan prasarana pariwisata.
4. Pelaksana perjalanan ke daerah tujuan dilakukan dalam waktu sementara.
5. Terdapat dampak yang ditimbulkan khususnya daerah tujuan segi social budaya, ekonomi, dan lingkungan.

2.1.4.2 Jenis Pariwisata

Sesuai potensi alam yang dimiliki suatu negara, maka timbul bermacam-macam pariwisata yang dikembangkan sebagai kegiatan, yang lama-kelamaan mempunyai ciri tersendiri. Jenis- jenis pariwisata dapat dibedakan menurut letak geografis yaitu: pariwisata lokal, pariwisata regional, dan pariwisata nasional yang terdiri dari pariwisata dalam negeri dan pariwisata internasional.

Banyak jenis pariwisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan yang terdapat di daerah tujuan wisata yang dapat menarik *customer* untuk mengunjunginya sehingga dapat pula diketahui jenis pariwisata yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut, jenis-jenis pariwisata tersebut adalah (Spillane, 1987):

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru, untuk mengurangi ketegangan syarafnya, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, untuk menikmati hiburan, dan sebagainya.

Contoh: Pemandangan alam (Gunung, Pantai).

2. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani akan menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

Contoh: Taman bermain, Wahana permainan.

3. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural tourism*)

Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset. Untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup masyarakat negara lain, dan sebagainya.

Contoh: Peninggalan Nenek moyang.

4. Pariwisata untuk urusan usaha dagang besar (*Business tourism*)

Dalam jenis pariwisata ini, unsur yang ditekankan adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku perjalanan ini yang menggunakan waktu-waktu bebasnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai objek wisata dan jenis pariwisata lain.

Contoh: Dinas, Seminar, Simposium, Kongres.

5. Pariwisata untuk olahraga (*Sports tourism*)

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk tujuan olahraga, baik hanya untuk menarik penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktekkannya sendiri.

Pariwisata ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori:

- a. *Big sports events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti *Olympiade Games*, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian bagi penonton atau penggemarnya.

b. *Sporting tourism of the practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain.

6. Pariwisata untuk konvensi (*Convention Tourism*)

Banyak negara yang tertarik dan menganggap jenis pariwisata ini dengan banyaknya hotel atau bangunan-bangunan yang khusus dilengkapi untuk menunjang *convention tourism*. Pariwisata ini bertujuan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan konvensi.

Contoh: Rapat kerja, Musyawarah nasional

2.1.4.3 Sarana Prasarana Pariwisata

Sarana dan prasarana pariwisata merupakan salah satu indikator perkembangan pariwisata. Sarana/prasarana diartikan sebagai proses tanpa hambatan dari pengadaan dan peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan terjangkau oleh wisatawan Tim Peneliti PMB-LIPI (2016:339).

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Suwanto (2004:22).

Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standar wisata yang baku, baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis

dan kualitas yang akan disediakan. Menurut Lothar A.Kreck dalam (yoeti, 1996:197). Sarana pariwisata terbagi atas:

- a. Sarana pokok kepariwisataan, yang dimaksud dengan sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata, termasuk ke dalam kelompok ini adalah: travel agent dan tour operator, perusahaan-perusahaan angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya, bar dan restoran, serta rumah makan lainnya, objek wisata, dan atraksi wisata lainnya.
- b. Sarana pelengkap kepariwisataan, yaitu perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Termasuk kedalam kelompok ini adalah sarana olahraga seperti lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang, permainan bowling, daerah pemburu, berlayar, permainan bola sodok, serta sarana ketangkasan seperti permainan bola sodok, *jackpot*, *pachino*, dan *amusement* lainnya.
- c. Sarana penunjang kepariwisataan, yaitu perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi. Termasuk kedalam kelompok ini adalah *nigth club*, *steambath*, *casin*.

Perasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti

jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Suwanto (2004:21).

Lothar A. Kreck dalam bukunya Internasional tourism dalam Yoeti (1996:186) membagi prasarana atas dua bagian yang penting, yaitu:

a. Prasarana perekonomian (*economy infrastructures*) yang dapat dibagi atas:

1) Pengangkutan (*Transportation*)

Pengangkutan disini adalah pengangkutan yang dapat membawa para wisatawan dari negara dimana ia biasanya tinggal ketempat atau negara yang merupakan daerah tujuan wisata.

2) Komunikasi (*commication Infrastructures*)

Tersedianya prasarana komunikasi akan dapat mendorong para wisatawan untuk mengadakan perjalanan jarak jauh, dengan demikian wisatawan tidak ragu-ragu meninggalkan rumah dan anak-anaknya. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya telepon, *telegraph*, radio, TV, surat kabar, internet, dan kantor pos.

3) Kelompok yang termasuk “UTILITIES”

Sarana “UTILITIES” adalah penerangan listrik. Persediaan air minum, sistem irigasi dan sumber energi.

4) Sistem perbankan

Adanya pelayanan bank bagi para wisatawan berarti bahwa wisatawan mendapat jaminan mutu dengan mudah menerima atau mengirim uangnya dari dan negara asalnya tanpa mengalami birokrasi pelayanan. Sedangkan untuk pembayaran lokal, wisatawan dapat menukarkan uangnya pada *money changer* setempat.

b. Prasarana sosial (*Social Infrastructure*)

Prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang ada. Termasuk dalam kelompok ini adalah:

1) Sistem pendidikan (*School System*)

Adanya lembaga-lembaga pendidikan yang megkhususkan diri dalam, pendidikan kepariwisataan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan tidak hanya pelayanan bagi para wisatawan, tetapi juga untuk memelihara dan mengawasi suatu badan usaha yang bergerak dalam kepariwisataan.

2) Pelayanan kesehatan (*Health Service Facilities*)

Harus ada jaminan bahawa di daerah tujuan wisata tersedia pelayanan bagi suatu penyakit yang mungkin akan diderita dalam perjalanan.

3) Faktor keamanan (*Safety Factor*)

Perasaan tidak aman (*unsafe*) dapat terjadi di suatu tempat yang baru saja dikunjungi. Adanya perlakuan yang tidak baik baik wajar dari penduduk setempat sekan-akan wisatawan yang datang mengganggu ketentraman.

4) Petugas yang langsung melayani Wisatawan (*Government Apparatus*)

Termasuk dalam kelompok ini antara lain petugas imigrasi, petugas bea cukai, petugas kesehatan, polisi, dan pejabat-pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelayanan para wistawan.

c. Prasarana pariwisata diantaranya:

1) *Receptive Tourist Plan*

Receptive Tourist Plan adalah segala bentuk badan usaha tani atau organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata.

2) *Recidental tourist Plan*

Recedintal tourist plan adalah semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan para wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata.

3) *Recreative and Sportive Plan*

Recreative and Sportive Plan adalah semua fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi olahraga.

2.1.5 Definisi Hotel dan Akomodasi

Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan akomodasi untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Usaha penyediaan akomodasi ini dapat berupa penyediaan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi yang disertai dengan fasilitas makanan dan minuman. Termasuk penyediaan akomodasi dengan furnitur, lengkap dengan dapur, dengan atau tanpa jasa pramuwisata dan sering kali termasuk beberapa tambahan jasa dan fasilitas seperti parkir, binatu, kolam renang, ruang olahraga, fasilitas rekreasi, dan ruang rapat. Adapun beberapa jenis-jenis usaha yang termasuk ke dalam akomodasi yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- b. Hotel bintang adalah usaha penyediaan akomodasi jangka pendek yang memenuhi keuntungan sebagai hotel bintang dan ditetapkan oleh instansi khusus

yang membinanya. Dalam Permen Parekraf RI no. PM.53/HM.001/MPEK/2013, disebutkan bahwa standar usaha hotel meliputi:

1. Aspek Produk usaha hotel yaitu fasilitas akomodasi berupa kamar-kamar yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minum, dan fasilitas lainnya.
 2. Aspek Pelayanan usaha hotel yaitu suatu proses yang memberikan kemudahan melalui prosedur standar pelayanan.
 3. Aspek Pengelolaan usaha hotel yaitu suatu sistem tata kelola dalam menjalankan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan usaha.
- c. Hotel nonbintang dapat disebut juga sebagai hotel melati. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
- d. Resort merupakan usaha akomodasi untuk relaksasi atau rekreasi, yang pada umumnya berlokasi didaerah-daerah peristirahatan, misalnya pantai atau pegunungan.
- e. Pondok wisata atau *homestay* adalah usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
- f. Losmen adalah sejenis penginapan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari satu bangunan khusus disebabkan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan (tanpa makan) yang menawarkan tarif kamar yang lebih murah dari pada hotel.

2.1.5.1 Peranan Hotel dalam Industri Pariwisata

Peranan hotel dalam industri pariwisata memang sangat penting. Hotel sebagian sarana akomodasi umum sangat membantu para wisatawan yang sedang berkunjung untuk berwisata dengan jasa penginapan yang disediakan oleh hotel.

Hubungan industri perhotelan dan kepariwisataan memiliki kaitan yang erat. Hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan (*main tourism superstructures*) yang berarti hidup dan kehidupannya banyak tergantung oleh wisatawan yang datang. Bila kita umpamakan industri pariwisata itu sebagai suatu bangunan, maka sektor perhotelan merupakan tiangnya.

Sebagai industri perdagangan yang bergerak dibidang jasa, pariwisata memiliki mekanisme peraturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari negara asalnya, di daerah tujuan wisata hingga kembali ke nagara asalnya dengan melibatkan banyak hal diantaranya: transportasi, penginapan, restoran, pemandu wisata, dan lain-lain. Oleh karena itu , industri pariwisata memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata.

Keberadaan hotel juga menentukan perkembangan dunia pariwisata di daerah setempat. Tanpa adanya akomodasi pariwisata yang memadai, maka industri pariwisata akan mengalami kesulitan dalam perkembangannya. Keberadaan hotel juga terkadang menjadi tolak ukur akan tingkat dan kualitas pariwisata setempat, sehingga tentunya mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah di segi pariwisata.

Menurut wahab (2013) dalam Pleanggra (2012) peran hotel dalam industri pariwisata adalah:

1. Seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau sedang berwisata tidak akan lepas dari kebutuhan dalam hidup yang paling pokok, yaitu makan dan

tidur. Hotel menyediakan jasa penginapan, makan, dan minuman serta jasa lainnya yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup para wisatawan.

2. Hotel menggantikan fungsi rumah “ di luar rumah” (*away home from home*) bagi para wisatawan atau pelaku perjalanan, dengan usaha memberikan:
 - a. Rasa aman (*secure*).
 - b. Rasa kenyamanan yang menyenangkan (*comfort*).
 - c. Kesendirian (*privacy*).
3. Hotel sebagaimana rumah adalah tempat awal atau basis seseorang dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari, seperti bekerja, bersantai , hidup dimasyarakat, berolahraga dan kegiatan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini hotel menyediakan fasilitas serta sarana yang diperlukan seperti televisi, telepon, *lobby*, aula, computer, dan lain-lain.

2.1.5.2 Kegiatan Usaha Hotel

Kegiatan usaha hotel meliputi:

- a) Penyediaan kamar tempat menginap.
- b) Penyediaan tempat pelayanan makan dan minum.
- c) Pelayanan pencucian pakaian/binatu
- d) Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggara kegiatan usaha hotel.

2.1.5.3 Tujuan Penjualan Kamar Hotel

Tujuan dari setiap usaha perhotelan adalah mencari keuntungan dengan menyewakan fasilitas dan menjual pelayanan kepada tamunya. Karakteristik usaha hotel dalam tujuan penjualannya (Pleanggra, 2012) pada umumnya selalu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyewaan kamar.
2. Penjualan makanan dan minuman.
3. Penyediaan pelayanan-pelayanan penunjang lainnya yang bersifat komersial.

Secara teoritis semakin tinggi tingkat hunian kamar hotel, maka secara langsung akan meningkatkan pendapatan hotel yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah sektor pariwisata melalui pajak hotel yang diterima dan juga akan meningkatkan tenaga kerja pada usaha hotel dan akomodasi.

2.1.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Hotel dan Akomodasi Pariwisata

2.1.6.1 Perjalanan Wisatawan Nusantara

Wisatawan Nusantara (wisnus) atau *domestic tourists* adalah seorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritorial suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau berkerja), dengan mengunjungi objek, wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.

Perjalanan wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh pengunjung ke tujuan utama diluar Lingkungannya yang biasa, kurang dari setahun, untuk tujuan utama apa pun selain untuk dipekerajan oleh entitas penduduk di negara atau tempat yang dikunjungi (UNWTO, Stastistik Glosarium, 2015).

Perjalanan wisata domestik atau outbound mengacu pada perjalanan pengunjung dari saat meninggalkan tempat tinggal biasanya sampai dia kembali: begitulah mengacu pada perjalanan pulang pergi (IRTS, 2008).

Perjalanan wisata (“perjalanan”/bepergian”) adalah bepergian/perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dari tempat tinggal biasanya ke tempat di luar lingkungan sehari-hari dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela selama kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk berkerja (memperoleh upah/gaji dari penduduk ditempat yang dituju) atau sekolah secara rutin. tempat diluar lingkungan sehari-hari dimaksud meliputi :

1. Obyek wisata komersial dan atau
2. Menginap di akomodasi komersial dan atau
3. Jarak perjalanan 100 km pulang-pergi atau lebih

2.1.6.2 Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Menurut undang-undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan orang yang melakukan wisata. sedangkan menurut Sihite (2000; 49) pengertian wisatawan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Wisatawan nusantara adalah wisatawan dalam negeri atau wisatawan domestik.
- 2) Wisatawan mancanegara adalah warga negara suatu negara yang mengadakan perjalanan keluar lingkungan dari negara (memasuki negara lain).

Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu:

1. Wisatawan (*tourist*)

Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

- a. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
 - b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.
2. Pelancong (*Excursionist*)

Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Menurut IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*), dalam Gamal Suwanto (2009:4) menggunakan batasan mengenai wisatawan secara umum pengunjung (*visitor*) yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah.

2.1.6.3 PDRB perkapita

PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasan, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelolah sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besarnya PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi

sumber daya alam dan faktor-faktor tersebut yang menyebabkan besaran PDRB bervariasi antara daerah. Sedangkan PDRB perkapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

2.1.6.4 Jumlah Hotel

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan amupun membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Sedangkan pengertian yang dimuat oleh *Grolier Electronic Publishinginc* (1995) yang menyebutkan bahawa hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum.

Selanjutnya dijelaskan oleh *United State Lodging Industri* bahawa, yang utama hotel terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Transient Hotel*, adalah hotel yang letak/lokasinya ditengah kota dengan jenis tamu yang menginap sebagaimana besar adalah untuk urusan bisnis dan turis.
2. *Residential Hotel*, adalah hotel yang pada dasarnya merupakan rumah-rumah berbentuk apartemen dengan kamar-kamarnya dan disewakan secara bulanan atau tahunan. Residential Hotel juga menyediakan kemudahan-kemudahan, seperti : layaknya hotel, seperti: restoran, pelayanan makanan yang diantar ke kamar, dan pelayanan kebersihan kamar.
3. *Resort Hotel*, adalah hotel yang pada umumnya berlokasi dan juga ruang serta fasilitas konfrensi untuk tamu-tamunya.

Mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas, dan untuk penggolongan hotel di Indonesia, pemerintah menurunkan peraturan yang dituangkan dalam surat keputusan *Menparpostel*, bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minuman serta jasa penunjukan lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

2.1.6.5 Upah Minimum

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Ricardo dalam arsyad (2010:124) upah dibedakan menjadi dua: pertama, upah menurut kodrat yaitu upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya. Kedua, upah menurut harga pasar yaitu upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Oleh ahli-ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 7 Tahun 2013 Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa upah minimum kabupaten/kota yang disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku untuk keseluruhan kabupaten/kota. Satuan upah minimum berupa rupiah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai sektor pariwisata adalah sebagai berikut

1. Penelitian Mbaiwa (2005) yang berjudul “ *Enclave Tourism and Its Social-Economic Impacts in The Okavango Delta, Botswana*” memiliki hasil pertumbuhan hotel dan restoran, jumlah wisatawan nusantara dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

2. Penelitian Mustika (2007) yang berjudul “ Investasi Swasta Sektor dan penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali”, memiliki hasil pertumbuhan hotel&restoran dan wisatawan mancanegara berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Penelitian Ghofur (2013) yang berjudul “ Pengaruh Fasilitas Hotel dan PDRB perkapita Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kecamatan Pacet” memiliki hasil pertumbuhan fasilitas hotel dan PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
4. Penelitian Canopus Widyatmoko (2007) yang berjudul “ Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali”, memiliki hasil rata-rata lama menginap, jumlah hotel dan upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1	Mbaiwa (2005)	<i>Enclave Tourism and Its Social-Economic Impacts in The Okavango Delta, Bostwana</i>	Variabel bebas Hotel dan resto ,Tingkat pendapatan Jumlah wisatawan nusantara Variabel terikat Penyerapan tenaga kerja Model analisis Regresi berganda	Hotel dan restoran, jumlah wisatawan nusantara dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
2	Mustika (2007)	Investasi Swasta Sektor Pariwisata dan penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali	Variabel bebas pertumbuhan hotel dan resto, wisatawan mancanegara Variabel terikat penyerapan tenaga kerja Metode analisis Regresi berganda	Pertumbuhan hotel dan restoran dan wisatawan mancanegara berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
3	Ghofur (2013)	Pengaruh Fasilitas Hotel Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kecamatan Pacet	Variabel bebas Hotel dan PDRB perkapita Variabel terikat Penyerapan tenaga kerja Metode analisis Regresi berganda	Pertumbuhan fasilitas hotel dan PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja
4	Canopus	Analisis	Variabel bebas	Rata-rata lama

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
	Widyatmoko (2007)	Penyerapan Tenaga Kerja Pada Hotel Berbintang Di Provinsi Bali	Rata-rata lama menginap, jumlah hotel dan upah minimum Variabel terikat Penyerapan tenaga kerja Metode analisis Regresi berganda	menginap, jumlah hotel dan upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

2.4 Kerangka Pemikiran

Keberhasilan dalam pengembangan industri pariwisata, mampu memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada usaha hotel dan akomodasi melalui beberapa faktor diantaranya jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara, PDRB perkotaan, jumlah hotel dan juga upah minimum di provinsi-provinsi yang termasuk ke dalam kawasan strategis pariwisata nasional.

Sektor pariwisata telah tumbuh menjadi sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, sektor pariwisata merupakan satu-satunya jasa yang termasuk dalam sepuluh komoditas ekspor dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan devisa negara. Seperti halnya sektor perekonomian lainnya, sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk semakin berkembang dengan adanya liberalisasi. Hal tersebut terjadi karena semakin terbukanya penduduk melakukan perjalanan ke luar negeri, meningkatnya volume perdagangan internasional dan masuk serta keluarnya investasi dari atau ke luar negeri. Peranan sektor pariwisata akan semakin bertambah penting dalam era globalisasi (Lumaksono, 2012).

Pembangunan industri pariwisata dapat diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan pada gilirannya nanti dapat meningkatkan pendapatan

masayarakat secara keseluruhan. Jadi jelasnya pembangunan industri pariwisata akan dapat menciptakan kesempatan kerja, yang sekaligus dapat menampung angkatan kerja yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya.

Secara teoritis (apriori) Ida Austriana (2005) menjelaskan bahwa semakin lama wisatawan tinggal disuatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan didaerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalann wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada didaerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata juga akan semakin meningkat. Jika jumlah wisatawan meningkat maka pengusaha akan melakukan investasi pada sarana dan prasarana pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan dan mengakomondirnya. Hal ini akan membuat dibutuhkannya tenaga kerja untuk berkerja pada lapangan pekerjaan baru tersebut sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat.

Secara umum, PDRB perkapita adalah ukuran daya beli masyarkat, jika PDRB perkapita meningkat berarti menunjukkan bahawa daya beli masyarkat dalam mengkonsumsi entah itu barang atau jasa meningkat. Dengan adanya peningkatan daya beli tersebut, itu akan mempengaruhi kepada konsumsi termasuk konsumsi wisata. Dalam berwisata, wisatawan akan mengeluarkan uangnya dalam melakukan kegiatan wisata. Setiap biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan selama melakukan kegiatan pariwisata meliputi biaya rekreasi, penginapan, serta penggunaan fasilitas jasa-jasa hiburan lainnya dapat memberikan hasil pada sektor perdagangan, hotel, dan

akomodasi lainnya (Arsyad, 1997). Hal tersebut akan terjadi jika struktur perekonomian suatu daerah lebih bersifat kepada padat karya atau labor intensive. Sehingga menyebabkan meningkatnya persediaan lowongan kerja untuk menyerap para tenaga kerja yang sebelumnya menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Fenomena ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga keluarganya.

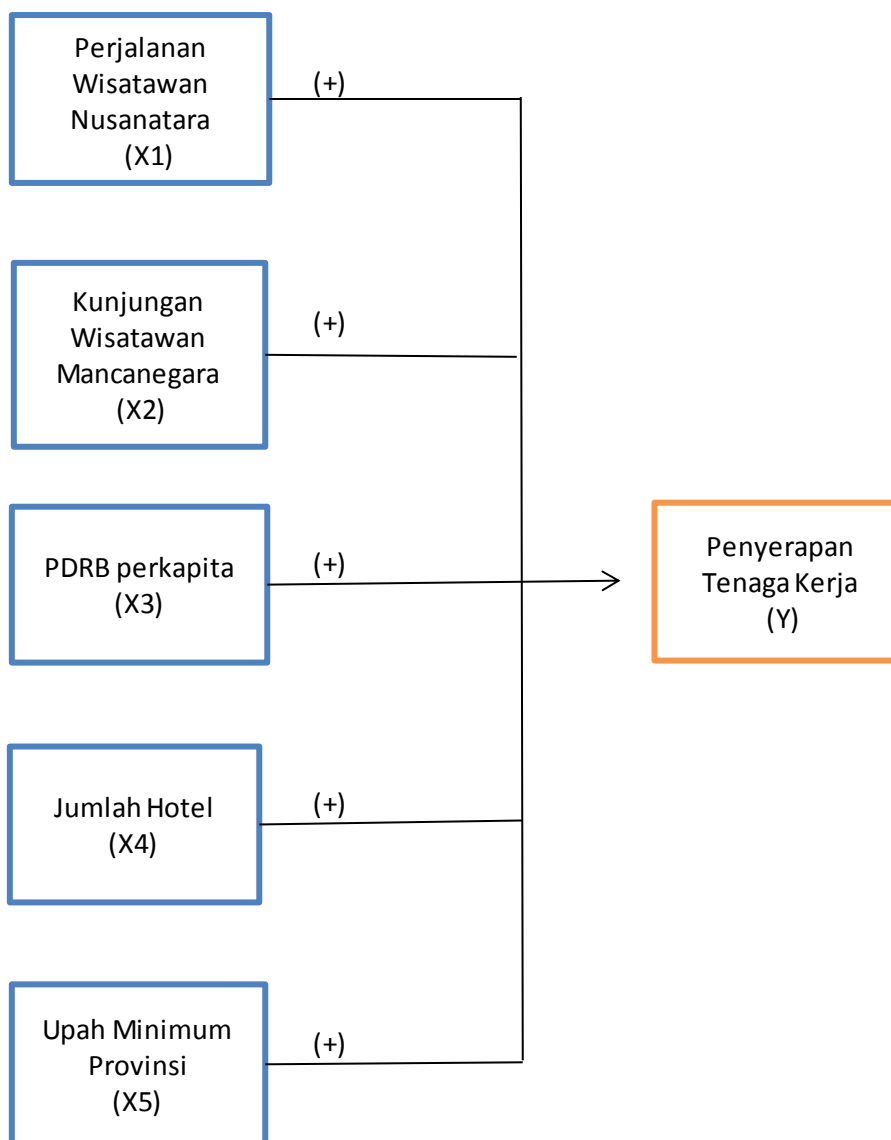
Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah minimum regional (UMR). Upah minimum ini merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Bappeda, 2010) dalam Chalid dan Yusuf (2015).

Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah kentanagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kehidupan minimum dari pekerja dan keluarganya. Tujuan dan manfaat kebijakan upah minimum diterapkan atau dibuat adalah untuk (1) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (2) meningkatkan produktivitas pekerja, (3) mengembangkan dan meningkatkan kualitas perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003).

Dapat dikatakan bahawa industri memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena melalui pembangunan industri tersebut dapat diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan pada gilirannya nanti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap

barang tertentu, maka jumlah tenaga kerja yang diminta suatu lapangan usaha akan semakin meningkat dengan saumsi tingkat upah tetap (Simanjuntak, 2005). Jadi jelasnya pembangunan industri akan dapat menciptakan kesempatan kerja, yang sekaligus dapat menampung angkatan kerja yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk maupun jasa pelayanan atau *service* yang nantinya baik langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan wisatawan nantinya, salah satunya adalah hotel. Pertumbuhan hotel akan membutuhkan tenaga kerja untuk berkerja pada hotel tersebut, hal ini akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sekitar hotel tersebut.

Selanjutnya informasi mengenai kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.6 Berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga jumlah perjalanan wisatawan nusantara berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Diduga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Diduga PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
4. Diduga jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
5. Diduga upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.